



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SENO SAMODRO.
Jabatan : Bupati Boyolali.

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Boyolali, 7 Januari 2021

BUPATI BOYOLALI,



**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	82,21 Nilai	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	1.475.475.174.249 Rp	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	1043 Investor	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan	4 Luasan RTH publik wilayah kota/kawasan perkotaan	1.437.322 m ²	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan	3,21 %	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	1540 unit	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	2 desa/kel	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (<i>green economy</i>)	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ditindak lanjuti	100 %	DLH
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	20 %	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	75,62 %	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	3.000 m	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	90,98 %	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	8.240 m	DPUPR
		14 Prosentase ketersediannya air baku	10,75 %	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	92 %	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	14,29 %	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	81,73 %	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	89,59 %	DPUPR
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	100 %	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	2000 Titik lampu	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35 Unit	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100 %	DISHUB
		23 Cakupan ketersedian kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100 %	DISHUB
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,039 %	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	8 Peringkat	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	1 Klub olahraga	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	4 Lapangan	DISPORAPAR
		28 Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	76 %	DINAS ARPUS
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	14,77 %	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	100 %	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada dokumen	BP3D
		32 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada dokumen	BP3D
		33 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada dokumen	SETDA
		34 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1 skor	SETDA
		35 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 %	BP3D
		36 Prosentase Peningkatan PAD	10,54 %	BKD
		37 Opini laporan keuangan daerah	WTP Opini	BKD
		38 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		39 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		40 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	25 temuan/rekomendasi	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayah	5 dokuman	SETDA
		42 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 dokuman	SETDA
		43 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	70 skor	SETDA
		44 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	83 %	BKP2D
		45 Prosentase tingkat ketiaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100 %	BKP2D
		46 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	80 %	SETDA
		47 Rumusan kebijakan teknis pemerintahaan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	62 dokuman	SETDA
		48 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	80 skor	SETDA
		49 Persentase kerjasama (MoU, Per-aturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	90 %	SETDA
		50 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	DISPENDUKCAPIL
		51 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 %	DISPENDUKCAPIL
		52 Persentase fasilitasi layanan persandian	100 %	DISKOMINFO
		53 Kualitas layanan e-procurement	81,00 skor	SETDA
		54 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	9 Media	DISKOMINFO, SETDA
		55 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokuman	DISKOMINFO
		56 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	85 %	BP3D
		57 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 %	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.		58 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	60 %	DINAS ARPUS
		59 Prosentase sanggahan lelang	4 %	SETDA
		60 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
		61 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	80 %	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	100 %	KANKESBANGPOL
		63 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	90 %	SATPOL PP
		64 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	95 %	SATPOL PP
		65 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	100 %	SATPOL PP
		66 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82 %	KANKESBANGPOL
		67 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	100 %	KANKESBANGPOL
		68 Indeks Resiko Bencana	80 %	BPBD
		69 Cakupan kebakaran yang tertangani	80 %	SATPOL PP
		70 Cakupan penanganan PMKS	39,77 %	DINSOS
		71 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70 perusahaan	DISKOPNAKER
		72 Tingkat penyerapan tenaga kerja	37,2 %	DISKOPNAKER
		73 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240 orang	DISKOPNAKER
		74 Rasio rumah layak huni	89 %	DPKP
		75 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	2,75 Ha	DPKP
		76 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	100 %	DP2KBP3A
		77 Cakupan Peserta KB.	80 %	DP2KBP3A
		78 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	1,2 %	DP2KBP3A
		79 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) yang Aktif.	100 %	DP2KBP3A
		80 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	21 %	DP2KBP3A
		81 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	100 %	DP2KBP3A
		82 Desa layak anak	34 desa	DP2KBP3A
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	30 UMKM	DISKOPNAKER
		84 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	50 koperasi	DISKOPNAKER
		85 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	54 %	DISKOPNAKER
		86 Kelompok binaan PKK	287 kelompok	DISPERMASDES
		87 Jumlah LSM	267 lembaga	DISPERMASDES
		88 Jumlah PKK aktif	287 kelompok	DISPERMASDES
		89 Posyandu aktif	1539 unit	DISPERMASDES
		90 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	100 %	DISPERMASDES
		91 Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	241 lembaga	DISPERMASDES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
12.	Meningkatnya Derajad kesehatan	92 Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4 per 1000 kh	DINKES
		93 Kasus Kematian Ibu	19 kasus	DINKES
		94 Penurunan Angka Kematian Balita	10 per 1000	DINKES
		95 Cakupan kunjungan bayi	95 %	DINKES
		96 Cakupan pelayanan anak balita	95 %	DINKES
		97 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100 %	DINKES
		98 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90 %	DINKES
		99 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	40 %	DINKES
		100 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100 %	DINKES
		101 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	45 %	DINKES
		102 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	45 %	DINKES
		103 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	47,5 per 100.000	DINKES
		104 Angka kematian DBD (CFR)	1,6 % dari jumlah penduduk	DINKES
		105 Prosentase jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil	50 %	DINKES
		106 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	> 85 %	DINKES
		107 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	50 %	DINKES
		108 Cakupan Desa UCI	100 %	DINKES
		109 Puskesmas Terakreditasi	10 puskesmas	DINKES
		110 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	15 %	DINKES
		111 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	1,5 %	DINKES
		112 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90 %	DINKES
		113 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	DINKES
		114 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100 %	DINKES
		115 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	20,69 %	DINKES
		116 Rasio dokter	17,0 %	DINKES
		117 Rasio dokter gigi	5,9 %	DINKES
		118 Rasio perawat	100,3 %	DINKES
		119 Rasio bidan	58 %	DINKES
		120 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	100 %	DINKES
		121 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	120 desa	DINKES
		122 Proporsi Rumah tangga sehat	75 %	DINKES
		123 Cakupan Desa STBM	267 desa	DINKES
		124 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	100 %	RSUD PANDAN ARANG
		125 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	88,33 %	RSUD SIMO
		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	100 %	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	82 %	DISDIKBUD
		128 APK SD	102,50 %	DISDIKBUD
		129 APK SMP	100,20 %	DISDIKBUD
		130 APM SD	87,50 %	DISDIKBUD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.		131 APM SMP	75,50 %	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	0,03 %	DISDIKBUD
		133 Angka Putus Sekolah SMP	0,15 %	DISDIKBUD
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	99,50 %	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	95 %	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,70 %	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	62,50 %	DISDIKBUD
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	75 %	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	20 orang	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	20 orang	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,15 %	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	95 %	DISDIKBUD
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	85 %	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	430 IKM	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	0 kawasan	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	9573 unit	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	95 unit	DISDAGPERIN
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	100 %	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200 pelaku usaha	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.239.335 Rp.	DISDAGPERIN
		151 Ekspor bersih perdagangan	165.917 US \$	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,50 %	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	298.751 ton	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:		DISPERTAN
		154 - Jagung	138.456 ton	DISPERTAN
		155 - Kedelai	6.898 ton	DISPERTAN
		Produksi tanaman hortikultura utama		DISPERTAN
		156 - Pepaya	126.121 kuintal	DISPERTAN
		157 - Cabe	115.611 kuintal	DISPERTAN
		158 - Bawang Merah	31.530 kuintal	DISPERTAN
		159 - Jahe	10.773 kuintal	DISPERTAN
		160 - Kencur	17.342 kuintal	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :		DISPERTAN
		161 - Cengkeh	383 ton	DISPERTAN
		162 - Kopi	153 ton	DISPERTAN
		163 - Kelapa	5.572 ton	DISPERTAN
		164 - Tembakau	5.234,03 ton	DISPERTAN
		165 - Tebu	36.246 ton	DISPERTAN
		166 - Lada	24,25 ton	DISPERTAN
		167 - Atsiri	59,99 Kuintal	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	26,97 %	DKP
		169 Meningkatnya Cadangan Pangan	100 %	DKP
		170 Skor Pola Pangan Harapan	92 skor	DKP
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	33.602 ton	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan		DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	8.460 ton	DISNAKKAN
		173 - Produksi susu (kilo liter)	48.201 kilo liter	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	320.731 ekor	DISNAKKAN
		175 - Sapi potong	90.000 ekor	DISNAKKAN
		176 - Sapi perah	89.310 ekor	DISNAKKAN
		177 - Kambing dan domba	141.421 ekor	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	77 %	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	93 %	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	52 %	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisata	454.848 orang	DISPORAPAR
		182 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata.	1.470.000 Rp (.000)	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	100 %	DISDIKBUD

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket	Penanggung Jawab
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah	4.111.340.000		DPMPTSP
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	90.000.000		DPMPTSP
3	Pengedalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000		DPMPTSP
4	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	60.000.000		DPMPTSP
5	Penunjang urusan pemerintahan daerah	15.304.072.000		DLH
6	Perencanaan Lingkungan Hidup	106.925.000		DLH
7	Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	887.665.000		DLH
8	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9.499.595.000		DLH
9	Pengelolaan Persampahan	2.263.963.000		DLH
10	Penunjang urusan pemerintahan daerah	83.062.255.000		DPUPR
11	Pengelolaan Sumber Daya Air	19.537.017.000		DPUPR
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.635.393.000		DPUPR
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.704.783.000		DPUPR
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	150.000.000		DPUPR
15	Penyelenggaraan Jalan	68.721.613.000		DPUPR
16	Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000		DPUPR
17	Penyelenggaraan Penataan Ruang	325.000.000		DPUPR

18	Penunjang urusan pemerintahan daerah	6.091.047.000	Disporapar
19	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	170.900.000	Disporapar
20	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	37.400.000.000	Disporapar
21	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	286.000.000	Disporapar
22	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.634.716.000	APBD dan DAK
23	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	616.128.000	DAK
24	Penunjang urusan pemerintahan daerah	3.954.805.000	Dinas Arpus
25	Pembinaan Perpustakaan	12.046.800.000	Dinas Arpus
26	Penunjang urusan pemerintahan daerah	5.592.557.000	BP3D
27	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	30.000.000	BP3D
28	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	146.000.000	BP3D
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	870.400.000	BP3D
30	Penunjang urusan pemerintahan daerah	21.343.229.000	Sekretariat Daerah
31	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	6.076.682.000	Sekretariat Daerah
32	Program perekonomian dan pembangunan	270.920.000	Sekretariat Daerah
33	Penunjang urusan pemerintahan daerah	38.483.350.000	BKD
34	Pengelolaan Keuangan Daerah	247.956.000	BKD
35	Pengelolaan Barang Milik Negara	1.387.000.000	BKD
36	Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.890.000.000	BKD
37	Penunjang urusan pemerintahan daerah	7.900.585.000	Inspektorat
38	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	136.450.000	Inspektorat
39	Penunjang urusan pemerintahan daerah	5.177.236.000	BKP2D
40	Kepegawaian Daerah	113.000.000	BKP2D
41	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.489.496.000	BKP2D
42	Penunjang urusan pemerintahan daerah	7.878.998.000	Dispendukcapil
43	Pendaftaran Penduduk	1.640.791.000	Dispendukcapil
44	Pencatatan Sipil	235.200.000	Dispendukcapil
45	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	673.555.000	Dispendukcapil
46	Penunjang urusan pemerintahan daerah	5.314.356.000	Diskominfo
47	Informasi dan Komunikasi Publik	720.620.000	Diskominfo
48	Aplikasi Informatika	2.201.860.000	Diskominfo
49	Penunjang urusan pemerintahan daerah	32.733.409.000	Sekretariat DPRD
50	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25.751.337.000	Sekretariat DPRD
51	Penunjang urusan pemerintahan daerah	1.954.096.000	Kankesbangpol
52	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28.485.000	Kankesbangpol
53	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.056.018.000	Kankesbangpol
54	Pemberdayaan dan Wawasan Organisasi Kemasyarakatan	990.000.000	Kankesbangpol
55	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	300.000.000	Kankesbangpol
56	Penunjang urusan pemerintahan daerah	8.429.659.000	Satpol PP
57	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.735.000	Satpol PP
58	Penunjang urusan pemerintahan daerah	3.811.370.000	BPBD
59	Penanggulangan Bencana	154.755.000	BPBD
60	Penunjang urusan pemerintahan daerah	5.188.380.000	Dinsos
61	Rehabilitasi Urusan Pemerintah Daerah	415.200.000	Dinsos
62	Perlindungan dan Jaminan Sosial	125.188.000	Dinsos
63	Penanganan Bencana	200.000.000	Dinsos
64	Penunjang urusan pemerintahan daerah	7.222.546.000	Diskopnaker
65	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	54.450.000	APBN
66	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	54.450.000	APBN
			Diskopnaker

67	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	74.361.000	APBN	Diskopnaker
68	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	54.450.000	APBN	Diskopnaker
69	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMK)	65.000.000	APBN	Diskopnaker
70	Pengembangan UMKM	127.693.000	APBD dan APBN	Diskopnaker
71	Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	2.715.058.000	APBN	Diskopnaker
72	Penunjang urusan pemerintahan daerah	3.613.219.000		DPKP
73	Pengembangan Perumahan	259.250.000		DPKP
74	Kawasan Permukiman	3.060.334.000	APBD dan DAK	DPKP
75	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	131.463.000		DPKP
76	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.047.252.000		DP2KBP3A
77	Program Perlindungan Perempuan	376.140.000	APBD dan DAK	
78	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25.500.000		DP2KBP3A
79	Program Pengendalian Penduduk	40.950.000		DP2KBP3A
80	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.104.282.000	APBD dan DAK	DP2KBP3A
81	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	968.800.000	APBD dan DAK	DP2KBP3A
82	Penunjang urusan pemerintahan daerah	10.045.557.000		Dispermasdes
83	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	96.700.000		Dispermasdes
84	Penunjang urusan pemerintahan daerah	66.713.862.000		Dinkes
85	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	107.140.559.000	APBD, DAK dan BLUD	Dinkes
86	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.000.000		Dinkes
87	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	689.415.000		Dinkes
88	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	497.506.000		Dinkes
89	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	138.660.000.000	APBD dan DAK	RSUD PA
90	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.412.176.000	APBD, DAK, dan BLUD	RSUD Simo
91	Penunjang urusan pemerintahan daerah	8.255.459.000		RSUD Waras Wiris
92	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	25.315.161.000	APBD, DAK, dan BLUD	RSUD Waras Wiris
93	Penunjang urusan pemerintahan daerah	552.570.351.000		Disdikbud
94	Pengelolaan Pendidikan	150.628.792.000	APBD dan APBN (DAK Non Fisik PAUD, Kesetaraan, DAK SD, DAK SMP, BOS SD dan SMP)	Disdikbud
95	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.208.600.000		Disdikbud
96	Pengembangan Kebudayaan	300.000.000		Disdikbud
97	Pengembangan Kesenian Tradisional	1.150.000.000		Disdikbud
98	Pengelolaan Permuseuman	625.000.000	APBD dan APBN (DAK Non Fisik BOP Museum)	Disdikbud
99	Penunjang urusan pemerintahan daerah	15.702.283.000		Disdagperin
100	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	56.935.000.000		Disdagperin
101	Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.565.243.000		Disdagperin
102	Penunjang urusan pemerintahan daerah	15.523.588.000	APBD	Dispertan
103	Penyuluhan Pertanian	120.000.000	APBD	Dispertan
104	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.168.791.000	APBD dan APBN	Dispertan
105	Penunjang urusan pemerintahan daerah	2.455.973.000		DKP
106	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	725.000.000	APBD dan DAK Fisik	DKP
107	Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	340.000.000	APBD dan DAK Fisik	DKP

108	Penunjang urusan pemerintahan daerah	8.123.224.000	Disnakkan
109	Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.110.500.000	APBD dan DAK Kelautan Perikanan
110	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	500.000.000	Disnakkan
111	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	80.000.000	Disnakkan

Boyolali, 7 Januari 2021

BUPATI BOYOLALI

